

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat memerlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019 ini mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2019 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra SKPD dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berisi tentang sasaran, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 mempunyai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pusat

pemerintahan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini, serta memusatkan Pembangunan yang berorientasi pada Pembangunan Desa.

Pemberian Otonomi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Hal tersebut sesuai dengan Visi Kabupaten Kubu Raya 2014 – 2019 Yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing”. **Maju**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) yang tinggi. **Harmonis dan Berbudaya**, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik. **Memiliki Daya Saing**, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kubu Raya. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) sub bagian, dan 9 (sembilan) sub bidang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk membangun sistem dan tata kelola keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel (*Good Governance*) demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan, keandalan sistem manajemen keuangan

daerah, dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang baru terbentuk membutuhkan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang unggul, kompeten, dan mampu menerjemahkan tuntutan tatakelola pemerintah yang akuntabel dan transparan sehingga sumber daya manusia yang ada harus menguasai teknologi informasi dan peraturan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD Perubahan 2014-2019;
3. Sebagai titik awal melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan

Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.

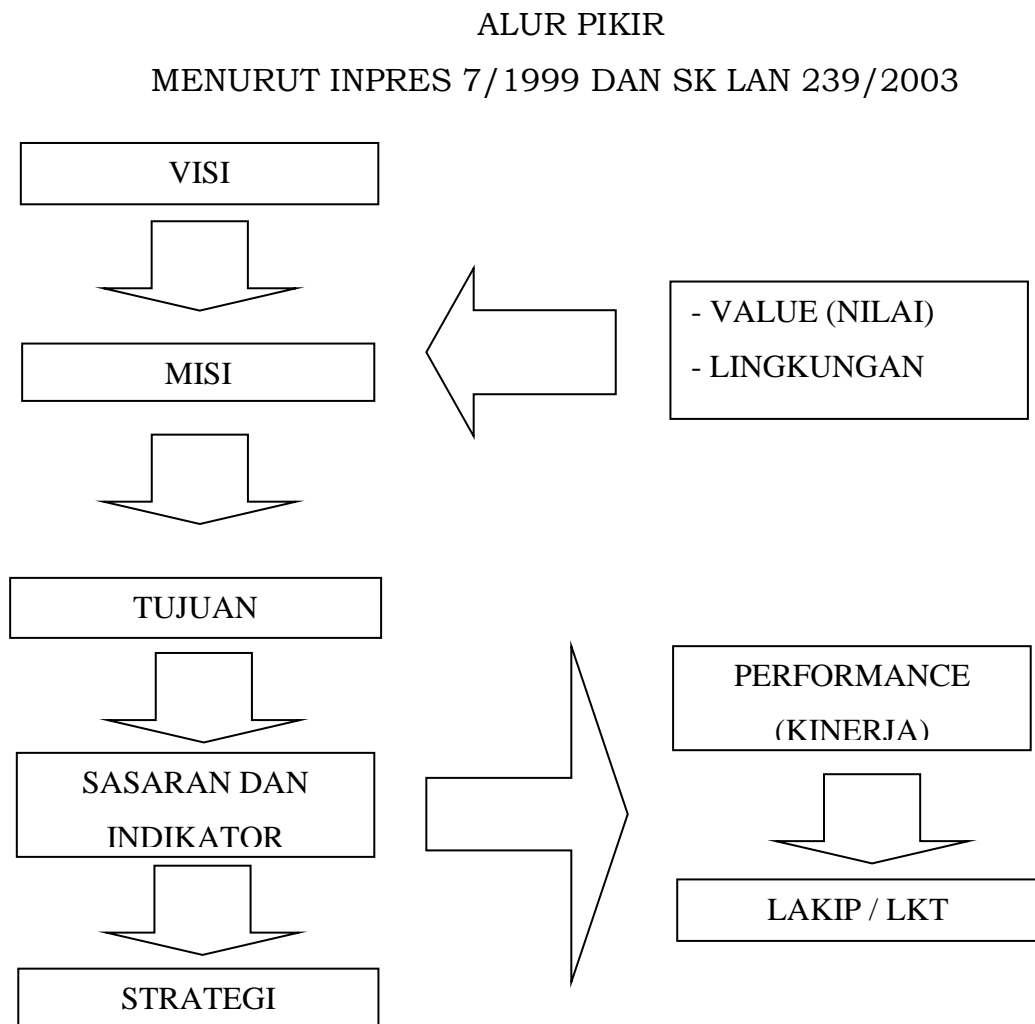
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini sebagai acuan utama bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
2. Menjamin komitmen BPKAD terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
4. Sebagai alat ukur kinerja Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi, bagan alur pikir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sistematika Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD
 - 2.2 SUMBER DAYA BPKAD
 - 2.3 KINERJA PELAYANAN BPKAD
 - 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD
- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD
 - 3.1.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
 - 3.1.2 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
 - 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
 - 1. VISI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019
 - 2. MISI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019
 - 3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019
 - 3.3 TELAAHAN TELAAHAN RENSTRA KABUPATEN KUBU RAYA DAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2015-2019
 - 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 - 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MEMENGAH PERANGKAT DAERAH
 - 1. TUJUAN BPKAD TAHUN 2015-2019
 - 2. SASARAN BPKAD TAHUN 2015-2019
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1 STRATEGI BPKAD TAHUN 2015=2019
 - 5.2 KEBIJAKAN BPKAD TAHUN 2015-2019
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu :

1. Tugas Fungsi

Sesuai Pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

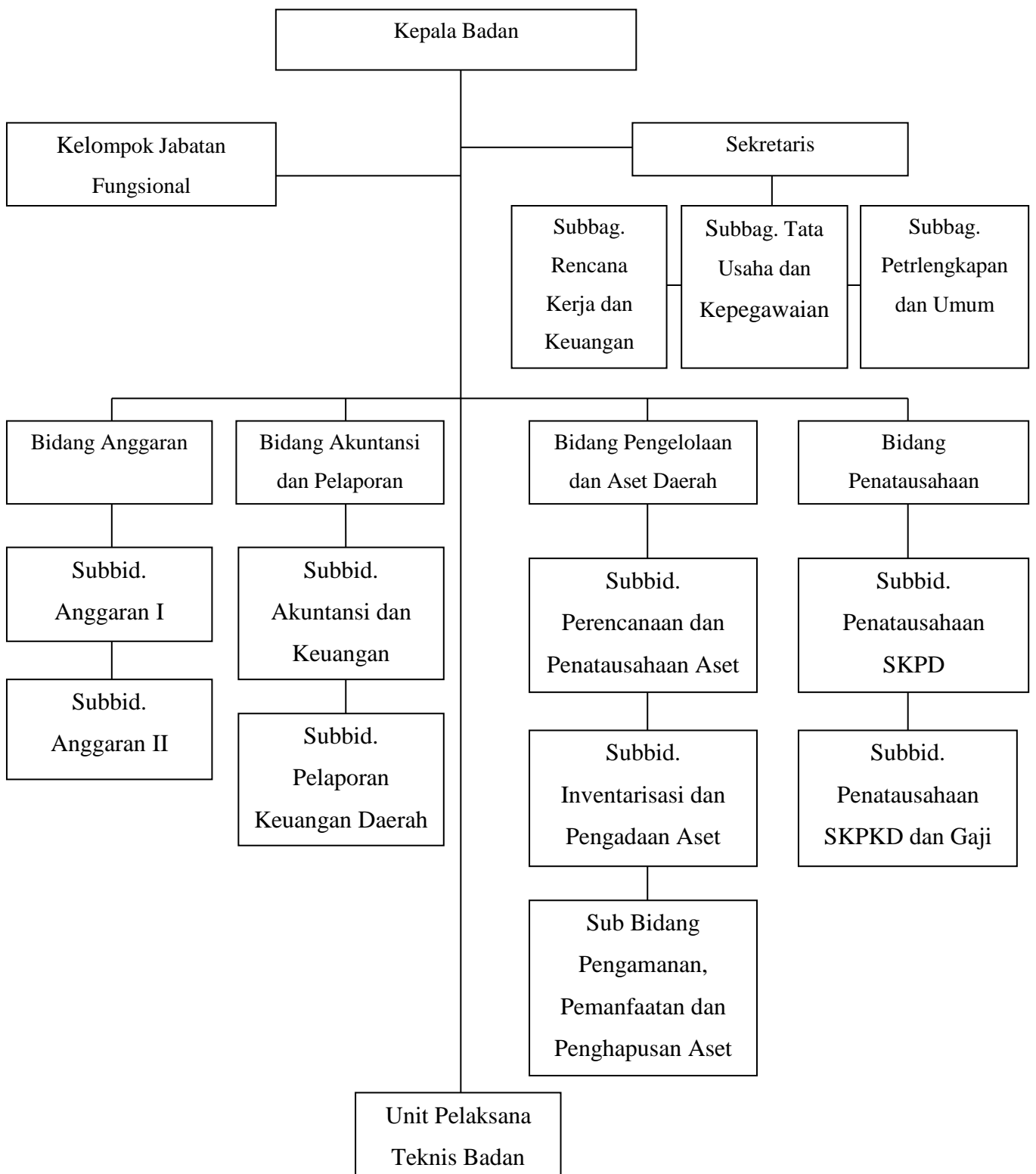
- a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b) Penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c) Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai BUD;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
- h) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Satuan Kerja

Struktur Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran I; dan
 2. Sub Bidang Anggaran II.
- d. Bidang Penatausahaan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penatausahaan SKPD; dan
 2. Sub Bidang Penatausahaan SKPKD dan Gaji.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Aset; dan
 3. Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan tahun 2017, sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 39 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. PNS BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Jenjang Pendidikan
(Keadaan sampai dengan tahun 2017)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S2	6	5	11
2.	S1	5	14	19
3.	D3	3	3	6
4.	SMA	2	1	3
	TOTAL	16	23	39

Tabel 2.2. PNS BPKAD Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang
(Keadaan sampai dengan tahun 2017)

NO	GOL. RUANG	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV/e	Pembina Utama	-	-	-
2	IV/d	Pembina Utama Madya	-	-	-
3	IV/c	Pembina Utama Muda	-	1	1
4	IV/b	Pembina Tingkat I	1	-	1
5	IV/a	Pembina	3	1	4
1	III/d	Penata Tingkat I	3	6	9

2	III/c	Penata	-	3	3
3	III/b	Penata Muda Tingkat I	4	4	8
4	III/a	Penata Muda	3	7	10
1	II/d	Pengatur Tingkat I	2	-	2
2	II/c	Pengatur	-	1	1
3	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	-	-	-
4	II/a	Pengatur Muda	-	-	-
		JUMLAH	16	23	39

Tabel 2.3. PNS BPKAD Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Eselon
(Keadaan sampai dengan tahun 2017)

NO	JABATAN	ESELON	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kaban	II.b	-	1	1
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1
3.	Kabid	III.b	3	1	4
4.	Kasubbag	IV.a	-	3	3
5.	Kasi	IV.a	5	4	9
6.	Pelaksana	Non Eselon	7	14	21
		JUMLAH	16	23	39

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya. Berikut data sarana dan prasarana serta perlengkapan pendukungnya :

**DATA BARANG INVENTARIS BPKAD BERDASARKAN KIB
PER TAHUN 2017**

NO	KIB	JUMLAH	SATUAN	HARGA (RP)
1	KIB A Tanah	9.167	M ²	2.814.518.800,00
2	KIB B Peralatan dan Mesin	534	Unit	4.145.532.739,30
3	KIB E Aset Tetap Lainnya	23	Buku	4.410.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi pembinaan berupa sosialisasi, pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset daerah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)						Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir										
3	Persentase kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)						100%	100%										
4	Ketepatan waktu Penyampaian Rancangan Peraturan				-	-	-	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD						anggaran berakhir	anggaran berakhir										
5	Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan				-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAP)				-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase				-	-	-	65%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar																		
8	Persentase Pencatatan Aset Tetap				-	-	-	60%	65%	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
9	Nilai SAKIP				-	-	-	A	A	-	-	-	-	-	-	-	86,42 %	-	-
10	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu				-	-	95%	-	-	-	-	100%	-	-			105,26 %	-	-
11	Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target				-	-	90%	-	-	-	-	92%	-	-			101,85 %	-	-

12	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu				-	-	100%	-	-	-	-	93%	-	-			93,01 %	-	-
13	Opini BPK terhadap pelaporan keuangan (WTP)				-	-	WTP	-	-	-	-	WTP	-	-			100,00 %	-	-
14	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu				-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-			100,00 %	-	-
15	Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala				-	-	6 bln setelah th anggaran berakhir	-	-	-	-	6 bln setelah th anggaran	-	-			100,00 %	-	-

	daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu																		
16	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU				-	-	90%	-	-	-	-	78%	-	-			86,42 %	-	-
17	Persentase pencatatan aset tetap				-	-	75%	-	-	-	-	106,78%	-	-			142,37 %	-	-
18	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				1 Perda APBD TA 2016	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	1 Perda APBD TA 2016	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-	100%	100%	-	-	-
19	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang				1 Perbu p Penjabaran APBD	1 Perbup Penjabaran APBD TA	-	-	-	1 Perbu p Penjabaran APBD	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-	100%	100%	-	-	-

	Penjabaran APBD TA.2017			TA 2016	2017				TA 2016									
20	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD			1 Perda Perubahan APBD TA 2015	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perda Perubahan APBD TA 2015	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	100%	100%	-	-	-
21	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD			1 Perbup Penjab aran Perubahan APBD TA 2015	1 Perbup Penjab aran Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	1 Perbup Penjab aran Perubahan APBD TA 2015	1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2016	-	-	-	100%	100%	-	-	-
22	Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD			41 SKPD	38 SKPD	-	-	-	41 SKPD	38 SKPD	-	-	-	100%	100%	-	-	-
23	Penerimaan Dana Perimbangan (100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

	DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)																	
24	Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			9226 SP2D	9226 SP2D	-	-	-	11.548 SP2D	5.602 SP2D	-	-	-	125,17%	60,72%	-	-	-
25	Tersedianya daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya			4264 Daftar Gaji	4264 Daftar Gaji/ Kartu Gaji	-	-	-	5.922 Daftar Gaji	5.807 Daftar Gaji/ Kartu Gaji	-	-	-	138,88%	136,18%	-	-	-
26	Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah			20 Juknis	20 Juknis	-	-	-	20 Juknis	20 Juknis	-	-	-	100%	100%	-	-	-
27	Tersedianya Perda			1 Perda Pertan	1 Perda Pertan	-	-	-	1 Perda Pertan	1 Perda Pertanggungjawa	-	-	-	100%	100%	-	-	-

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			ggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	ggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015				ggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	ban Pelaksanaan APBD TA 2014								
28	Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	100%	100%	-	-	-
29	Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara Tepat Waktu			100%	100%	-	-	-	100%	99,97%	-	-	-	99,97%	99,97%	-	-	-
30	Tersedianya Laporan			1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan Keuangan	-	-	-	100%	100%	-	-	-

	Keuangan Kabupaten Kubu Raya				Keuan gan KKR	Keuan gan KKR				Keuan gan KKR	n KKR								
31	Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset daerah				2 Regula si	2 Regula si	-	-	-	2 Regul asi	2 Regulasi	-	-	-	100%	100%	-	-	-
32	Terinventarisirny a Aset Daerah Dalam SIMBADA				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
33	Jumlah Aset Daerah Yang Dihapus Tiap Tahun				41 SKPD	38 SKPD	-	-	-	13 SKPD	15 SKPD	-	-	-	31,71 %	39,47	-	-	-
34	Persentase Bertambahnya Aset Daerah Tiap Tahun				2%	2%	-	-	-	10,55 %	6,55%	-	-	-	527,5 0%	327,50%	-	-	-
35	Tersedianya informasi dari Sistem				100%		-	-	-	32%		-	-	-		32%	-	-	-

	Perencanaan Pembangunan																		
36	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Kinerja BPKAD.				4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	100%	100%	-	-	-

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPKAD TAHUN 2015-2019
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
	BELANJA																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
	Belanja Pegawai																	
	BELANJA LANGSUNG																	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
	Sistem informasi Perencanaan SKPD	10.200.000					3.268.900					32,05%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Renstra SKPD	10.500.000		10.000.000		10.000.000	10.500.000		9.738.000		9.500.000	100,00%	-	97,38%	-	-	-1,61%	-3,28%

	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD			4.000.000	8.500.000	8.500.000			3.999.900	8.075.000	8.075.000	-	-	100,00%	95,00%	95,00%	28,56%	26,39%	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000			119.000	385.000	285.000			23,8	77,00%	57,00%	-	-	0,00%	33,79%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		2.400.000	2.600.000	3.825.000	5.825.000		2.276.800	2.573.700	3.825.000	5.825.000	-	94,87%	98,99%	100,00%	100,00%	24,82%	26,47%	
	Penyediaan jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	30.000.000				85.677.000	12.893.500				64,91%	42,98%	-	-	-	-52,33%	-61,21%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.400.000	134.400.000	150.000.000			133.200.000	133.020.000	134.000.000		-	99,11%	98,97%	89,33%	-	-	3,73%	0,20%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.200.000	41.824.650	25.600.000	27.400.000	29.200.000	37.973.275	41.036.875	25.556.975	27.400.000	29.200.000	62,05%	98,12%	99,83%	100,00%	100,00%	-13,76%	-5,12%	

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.000.000	49.757.500	44.999.600	59.790.000	60.000.000	62.683.150	44.060.500	44.981.700	59.790.000	60.000.000	96,44%	88,55%	99,96%	100,00%	100,00%	-1,59%	-0,87%
	Penyediaan cetak dan penggandaan	40.000.000	40.000.000	20.250.000	32.230.000	32.000.000	29.365.000	20.716.000	19.920.000	30.618.500	32.000.000	73,41%	51,79%	98,37%	95,00%	100,00%	-4,36%	1,73%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.550.000	6.550.000	6.550.000	5.500.000	6.550.000	4.550.000	6.550.000	6.550.000	5.500.000	6.550.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,56%	7,56%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.942.500	9.672.500	9.817.200	7.700.000	10.204.800	6.180.000	6.900.000	8.920.000	7.700.000	10.204.800	69,11%	71,34%	90,86%	100,00%	100,00%	2,68%	10,55%
	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	46.200.000	42.000.000	39.000.000	40.000.000	14.170.000	45.705.000	41.350.000	39.000.000	40.000.000	70,85%	98,93%	98,45%	100,00%	100,00%	14,87%	23,07%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	70.001.042	61.934.000	136.040.000	141.400.000	141.400.000	63.074.300	43.200.400	121.790.680	134.330.000	134.330.000	90,10%	69,75%	89,53%	95,00%	95,00%	15,10%	16,32%
	Rapat-Rapat Koordinasi & konsultasi Dlm daerah	10.000.000	8.933.000	17.866.000	8.933.000	17.866.000	2.252.500	5.315.000	16.866.000	8.933.000	17.866.000	22,53%	59,50%	94,40%	100,00%	100,00%	12,31%	51,31%

	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	15.527.500		7.000.000			12.093.100		7.000.000			77,88%	-	100,00%	-	-	-32,86%	-23,92%
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	86.250.000					77.200.000					89,51%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Penataan Arsip/dokumen pengelolaan keuangan	10.310.000	162.197.000	182.284.000	173.280.000	173.280.000	7.470.000	142.094.500	120.132.500	164.616.000	164.616.000	72,45%	87,61%	65,90%	95,00%	95,00%	75,83%	85,62%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	40.000.000	36.000.000	360.375.000			35.720.000	32.720.000	336.974.000			89,30%	90,89%	93,51%	-	-	108,08%	111,30%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.985.600	48.790.000	9.000.000	4.550.000	2.000.000	8.985.600	47.890.000	9.000.000	4.550.000	2.000.000	100,00%	98,16%	100,00%	100,00%	100,00%	-25,95%	-25,95%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	227.222.900	249.687.000	176.001.000	54.338.000	56.900.000	220.013.900	246.537.000	173.999.800	54.338.000	56.900.000	96,83%	98,74%	98,86%	100,00%	100,00%	-24,19%	-23,70%
	Pengadaan Meubeleur	24.495.000	34.900.000	33.000.000	19.755.000		16.614.000	30.900.000	32.450.000		-	67,83%	88,54%	98,33%	-	-	10,44%	25,00%
	Pengadaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat	190.000.000	110.000.000	82.000.000	80.000.000	160.000.000	190.000.000	104.000.000	82.000.000	80.000.000	160.000.000	100,00%	94,55%	100,00%	100,00%	100,00%	-3,38%	-3,38%

	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4.000.000	5.000.000	5.000.000	40.151.210	15.000.000	2.800.000	4.440.000	4.875.000		14.250.000	70,00%	88,80%	97,50%	-	-	7,72%	20,30%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	32.400.000	45.525.000	43.800.000	50.300.000	50.300.000	29.331.200	40.233.000	34.496.650	47.785.000	47.785.000	90,53%	88,38%	78,76%	95,00%	95,00%	9,20%	10,25%
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.800.000	20.600.000	19.600.000	14.000.000	15.000.000	18.800.000	20.100.000	19.600.000	14.000.000	15.000.000	100,00%	97,57%	100,00%	100,00%	100,00%	-4,42%	-4,42%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	5.919.025	9.000.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.825.000	7.988.000	3.998.000	4.000.000	4.000.000	81,52%	88,75%	99,95%	100,00%	100,00%	-7,54%	-3,68%
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	20.000.000	25.000.000	26.000.000	15.000.000	20.000.000	17.390.000	21.707.000	25.830.000	15.000.000	20.000.000	86,95%	86,83%	99,35%	100,00%	100,00%	0,00%	2,84%
	Pemeliharaan Website					50.000.000					47.500.000						0,00%	0,00%
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	41.470.000		72.720.000		20.700.000	25.740.000		72.720.000		20.700.000	62,07%	-	100,00%	-	-	-20,67%	-7,01%	
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	11.000.000					8.140.000					74,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	Bintek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40.000.000	82.500.000	75.000.000	75.550.000	76.000.000	39.870.400	77.689.800	57.214.868	71.772.500	72.200.000	99,68%	94,17%	76,29%	95,00%	-	13,70%	12,61%	
	Peny. Evaluasi Jabatan SKPD	15.000.000	13.447.000	10.000.000	10.000.000		6.651.800	10.046.000	9.999.500	10.000.000	-	44,35%	74,71%	100,00%	100,00%	-	-100,00%	-100,00%	
	Penyusunan Analisis Jabatan			10.000.000					9.826.000			-	-	98,26%	-	-	0,00%	0,00%	
	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian			19.000.000	61.300.000	60.300.000			19.000.000	58.235.000	57.285.000	-	-	100,00%	95,00%	95,00%	46,96%	44,46%	
	Pembelajaran di kantor sendiri (inhouse training)			5.800.000					5.510.000	-	-	-	-	95,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.857.500	9.022.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.965.500	7.472.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60,52%	82,82%	100,00%	100,00%	100,00%	0,29%	10,88%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	18.600.000	12.305.000	5.000.000	7.261.500	7.500.000	6.181.900	10.107.000	4.520.000	6.898.425	7.125.000	33,24%	82,14%	90,40%	95,00%	95,00%	-16,61%	2,88%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	30.000.000	13.732.000	10.000.000	9.500.000	10.000.000	24.708.000	11.088.800	9.508.000	9.025.000	9.500.000	82,36%	80,75%	95,08%	95,00%	95,00%	-19,73%	-17,40%	
	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA			9.000.000	9.500.000	9.500.000			7.000.000	9.025.000	9.025.000	-	-	77,78%	95,00%	95,00%	1,82%	8,84%	
	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD	9.200.000	8.336.500	10.000.000	10.000.000		3.891.400	7.549.500	10.000.000	10.000.000	-	42,30%	90,56%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%	
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		

	Penyusunan Standar Satuan Harga	59.254.000	84.450.000	80.000.000	45.010.000	94.200.000	59.125.000	82.152.900	79.847.000	45.010.000	89.490.000	99,78%	97,28%	99,81%	100,00%	95,00%	9,72%	8,64%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	92.219.000	48.183.750	36.219.100	53.290.700	102.670.750	86.374.000	45.280.500	35.427.800	50.626.165	97.537.213	93,66%	93,97%	97,82%	95,00%	95,00%	2,17%	2,46%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	133.664.350	290.312.050	567.232.000	534.236.000	589.536.000	83.335.100	278.596.405	546.562.000	507.524.200	560.059.200	62,35%	95,96%	96,36%	95,00%	95,00%	34,55%	46,38%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	90.877.000	163.482.750	251.013.000	199.525.000	241.275.000	81.150.200	138.267.500	239.276.500	189.548.750	229.211.250	89,30%	84,58%	95,32%	95,00%	95,00%	21,57%	23,08%
	Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	262.889.000	184.764.000	194.624.000	168.922.250	209.400.000	141.980.000	176.858.058	184.237.700	168.922.250	209.400.000	54,01%	95,72%	94,66%	100,00%	100,00%	-4,45%	8,08%

	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	165.132.350	164.313.150	242.586.100	277.494.400	286.294.400	117.050.400	160.684.900	236.790.627	263.619.680	271.979.680	70,88%	97,79%	97,61%	95,00%	95,00%	11,63%	18,37%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	150.413.350	180.248.000	199.999.800	130.958.300	211.612.750	129.909.600	168.285.400	199.753.251	130.958.300	211.612.750	86,37%	93,36%	99,88%	100,00%	100,00%	7,07%	10,25%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	137.637.700	109.444.700	100.000.000	98.313.800	210.697.230	125.314.550	105.072.100	98.780.435	98.313.800	210.697.230	91,05%	96,00%	98,78%	100,00%	100,00%	8,89%	10,95%
	Sosialisasi Paket Regulasi Tt. Pengelolaan Keuangan Daerah	110.893.850	98.843.850	33.366.900	15.037.500	10.648.850	95.056.850	93.912.300	33.261.900	15.037.500	10.648.850	85,72%	95,01%	99,69%	100,00%	100,00%	-37,41%	-35,45%

	Manajemen Penatausahaan Barang Daerah	213.789.750	108.452.000	84.125.400	77.500.000	522.000.000	208.465.175	108.051.306	81.077.160	77.500.000	522.000.000	97,51%	99,63%	96,38%	100,00%	100,00%	19,55%	20,15%
	Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAK,DAU dan Dana Bagi Hasil)		36.676.000	121.584.000	64.178.450	88.905.900		36.128.000	121.579.637	64.178.450	88.905.900	#DIV/0!	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	24,78%	25,25%
	Rekonsiliasi Penggajian	46.005.250	56.800.000	76.600.000	64.806.600	65.000.000	45.827.075	51.901.700	65.983.062	64.806.600	65.000.000	99,61%	91,38%	86,14%	100,00%	100,00%	7,16%	7,24%
	Penataan Administrasi Penggajian	371.687.000	338.683.000	326.400.000	245.472.800	245.472.850	361.684.100	324.872.900	322.493.100	245.472.800	233.199.208	97,31%	95,92%	98,80%	100,00%	95,00%	-7,96%	-8,40%
	Penatausahaan Keuangan Daerah	380.391.200	442.881.200	492.000.000	418.647.175	462.953.700	340.808.200	442.097.600	471.970.500	418.647.175	439.806.015	89,59%	99,82%	95,93%	100,00%	95,00%	4,01%	5,23%
	Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran Daerah	85.648.475	89.917.475	87.485.000	147.532.900	135.463.550	65.380.275	71.338.200	86.932.461	140.156.255	128.690.373	76,34%	79,34%	99,37%	95,00%	95,00%	9,60%	14,50%

	Penyusunan Laporan Keuangan daerah (Neraca, Arus Kas dan CALK)	158.079.500	190.606.025	189.999.800	121.076.300	170.982.700	138.459.835	177.160.400	188.024.000	121.076.300	162.433.565	87,59%	92,95%	98,96%	100,00%	95,00%	1,58%	3,25%
	Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis SAP Akrual	209.785.900	139.126.700	92.948.600			135.029.900	132.360.500	92.556.600		-	64,37%	95,14%	99,58%	-	-	-100,00%	-100,00%
	Inventarisasi Barang Daerah	284.000.000	332.180.000	302.667.000	181.438.000	209.800.000	239.611.125	314.396.900	297.057.719	181.438.000	199.310.000	84,37%	94,65%	98,15%	100,00%	95,00%	-5,88%	-3,62%
	Penilaian Barang Inventaris Milik Pemda KKR	132.522.000	97.619.000	99.841.000	42.265.000	60.000.000	121.098.400	81.487.000	98.940.000	42.265.000	60.000.000	91,38%	83,47%	99,10%	100,00%	100,00%	-14,66%	-13,10%
	Penyusunan Daftar Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Daerah	38.000.000	33.164.500	38.000.000	34.523.000	36.109.000	34.657.000	32.588.600	37.837.000	34.523.000	34.303.550	91,20%	98,26%	99,57%	100,00%	95,00%	-1,02%	-0,20%
	Penatausahaan Keuangan SKPKD	72.739.900	56.455.500	60.000.000	13.520.600	30.000.000	41.143.125	31.305.000	55.373.527	13.520.600	30.000.000	56,56%	55,45%	92,29%	100,00%	100,00%	-16,23%	-6,12%

Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Aset Daerah dan Barang Persediaan SKPD	22.247.500	33.706.400	30.000.000	46.670.000	53.891.000	22.094.250	30.009.400	29.957.000	44.336.500	51.196.450	99,31%	89,03%	99,86%	95,00%	95,00%	19,36%	18,30%
SOP Penghapusan Dan Pemusnahan Barang Inventaris Milik Daerah	10.000.000					9.870.500					98,71%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA, Dan Anggaran Kas SKPD	338.037.100	236.738.000	287.532.500	192.678.400	204.378.400	219.644.100	210.743.850	284.859.500	192.678.400	204.378.400	64,98%	89,02%	99,07%	100,00%	100,00%	-9,57%	-1,43%
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	167.100.000	82.852.900	39.900.000			94.204.050	74.552.079	39.510.900		-	56,38%	89,98%	-	-	-	-37,96%	-25,15%
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	97.429.875	28.674.500				46.874.875	14.693.000				48,11%	51,24%	-	-	-	-45,75%	-44,01%

	Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemda KKR	99.429.875	118.900.700	97.600.000	60.046.000	80.000.000	87.899.250	81.232.500	71.996.665	60.046.000	76.000.000	88,40%	68,32%	73,77%	100,00%	95,00%	-4,26%	-2,87%
	Manajemen Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	232.881.800	225.046.000	144.179.800	102.123.700	159.653.900	206.267.875	209.585.300	143.959.241	102.123.700	151.671.205	88,57%	93,13%	99,85%	100,00%	95,00%	-7,27%	-5,96%
	Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Anggaran	277.164.700	142.624.000				252.799.100	110.997.420				91,21%	77,83%	-	-	-	-28,27%	-33,74%
	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	35.000.000		34.000.000			21.930.800		32.750.000		-	62,66%	-	96,32%	-	#DIV/0!	-0,96%	14,30%
	Penyusunan Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	25.000.000	24.173.000	26.000.000	23.072.000	30.000.000	24.562.525	20.220.600	25.822.000	23.072.000	28.500.000	98,25%	83,65%	99,32%	100,00%	95,00%	3,71%	3,02%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	89.600.600	140.536.000	134.870.000	77.744.900	115.000.000	68.908.600	79.355.700	132.449.048	77.744.900	109.250.000	76,91%	56,47%	98,20%	100,00%	95,00%	5,12%	9,66%

	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	194.810.000		150.000.000		150.000.000	154.161.175		139.189.172		142.500.000	79,13%	-	92,79%	-	-	-12,25%	-4,98%
	Sensus Barang Milik Daerah					250.000.000					237.500.000					95,00%	0,00%	0,00%
	Bintek Tentang Tatacara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Pengelola Keuangan	42.506.300					37.249.300					87,63%	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Manajemen Aplikasi SIMDA		151.223.440	19.006.000	41.806.000	41.806.000		125.362.440	19.002.500	39.715.700	39.715.700	#DIV/0!	82,90%	99,98%	95,00%	95,00%	-27,49%	-24,98%
	Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara SKPD		88.900.500	101.885.000	42.874.250	68.839.970		86.302.500	101.473.000		65.397.972	-	97,08%	99,60%	-	-	-8,17%	-8,83%
	Analisis Standar Belanja		120.738.300			294.422.500		120.560.300			279.701.375	-	99,85%	#DIV/0!	-	-	0,00%	0,00%

	Fasilitasi Penataan aset Pada SKPD			10.000.000					10.000.000		-	-	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	
	Penyelesaian Kerugian Daerah			41.000.000	41.220.000	28.000.000			29.690.000	39.159.000	26.600.000	-	-	72,41%	95,00%	95,00%	-11,94%	-3,60%
	Peningkatan pengelolaan anggaran		30.976.000	76.410.700	54.238.000	54.238.000		30.976.000	74.983.572	54.238.000	54.238.000	-	100,00%	98,13%	100,00%	100,00%	15,03%	15,03%
	Konsolidasi dan Konsultasi Penganggaran			84.895.400					81.941.062		-	-	96,52%	-	-	0,00%	0,00%	
	Manajemen Pinjaman Daerah			155.400.000	71.764.800				155.400.000			-	-	100,00%	-	-	0,00%	0,00%
	Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD				27.477.000	28.500.000				26.103.150	27.075.000	-	-	-	95,00%	95,00%	1,84%	1,84%
	Manajemen Aplikasi Pemetaan Aset Daerah				85.944.000	91.000.000				81.646.800	86.450.000	-	-	-	95,00%	95,00%	2,90%	2,90%
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	
	Pembuatan Website		51.400.000		25.000.000			50.678.800			30.000.000	-	98,60%	-	-	-	-100,00%	-23,06%
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah																	

	Penyusunan Database E-Formasi			5.000.000	8.000.000				4.982.500	7.600.000	-	-	-	99,65%	95,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
	Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan (SKJ)			7.000.000	7.000.000				5.553.000	6.650.000	-	-	-	79,33%	95,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			7.000.000	9.000.000	7.000.000			6.472.000	8.550.000	6.650.000	-	-	92,46%	95,00%	95,00%	0,00%	0,91%
	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat				9.000.000	9.000.000				8.550.000	8.550.000	-	-	-	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%
	Penyusunan Standar Pelayanan			8.000.000	9.000.000				7.286.000	8.550.000	-	-	-	91,08%	95,00%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%
	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD				9.500.000					9.025.000					95,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya menggunakan analisa metode SWOT.

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis di bidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan *stakeholder* telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam

rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;

4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
2. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset/barang daerah di Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III
PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ kesatuan kerja, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam penyusunan permasalahan isu strategis, BPKAD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 menggunakan metode analisis *Strength, Weakness, Opportunities, And Threat (SWOT)*. Metode tersebut akan menghasilkan identifikasi permasalahan pilihan strategis (*strategic analysis choices*) dan dapat digunakan untuk menentukan faktor keberhasilan dan faktor ancaman / kegagalan sebagaimana penjabaran berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

Merupakan proses identifikasi terhadap permasalahan penentu keberhasilan dan penentu ancaman / kegagalan lingkungan Satuan Kerja berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mencapai tujuan, mencakup sejumlah variable yang berada di dalam Satuan Kerja yaitu :

- a. Analisis Kekuatan (*Strength*), Kekuatan BPKAD Kabupaten Kubu Raya adalah:
 - 1) Adanya Struktur Satuan Kerja serta visi dan misi yang jelas.
 - 2) Adanya pegawai guna melaksanakan program dan kegiatan.

- 3) Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.
 - 4) Adanya komitmen kepala dinas dan seluruh staf.
- b. Analisis Kelemahan (*Weakness*), Kelemahan BPKAD Kabupaten Kubu Raya adalah:
- 1) Jumlah pegawai belum memadai.
 - 2) Kompetensi pegawai.
 - 3) Belum ada gedung kantor yang representatif.
 - 4) Standar beban kerja belum tersedia

Dari beberapa kekuatan dan kelemahan internal BPKAD Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan pembobotan sehingga mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2015-2019 dapat terukur.

Pembobotan Faktor Internal

Kekuatan

NO	LINGKUNGAN	BOBOT	RATING	SCORE (BOBOT X RATING)	PENGARUH
1	Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan	25	4	100	I
2	Adanya Struktur Satuan Kerja serta visi dan misi yang jelas	20	4	80	II
3	Adanya pegawai guna melaksanakan program dan kegiatan.	15	3	45	III
4	Adanya komitmen kepala badan dan seluruh staf.	15	3	45	IV

Kelemahan

NO	LINGKUNGAN	BOBOT	RATING	SCORE (BOBOT X RATING)	PENGARUH
1	Jumlah pegawai belum memadai.	20	4	80	I
2	Kompetensi pegawai Belum memadai.	15	4	60	II
3	Belum ada gedung kantor yang representatif.	15	3	45	III

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Merupakan proses identifikasi terhadap permasalahan penentu keberhasilan dan penentu ancaman / kegagalan lingkungan di luar Satuan Kerja berdasarkan peluang dan ancaman untuk mencapai tujuan Satuan Kerja. Sejumlah variabel penentu keberhasilan dan kegagalan berada di luar lingkungan eksternal Satuan Kerja yaitu:

- a. Analisis Kekuatan (*Strength*), kekuatan di luar lingkungan BPKAD Kabupaten Kubu Raya adalah:
 - 1) Program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pengelolaan kas daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Adanya Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.
- b. Analisis Kelemahan (*Weakness*), kelemahan di luar lingkungan BPKAD Kabupaten Kubu Raya adalah:
 - 1) Cepatnya perubahan peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan.
 - 2) Lemahnya akses sistem jaringan informasi.
 - 3) Sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Dari beberapa kekuatan dan kelemahan eksternal BPKAD Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan pembobotan sehingga mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2015-2019 dapat terukur.

Pembobotan Faktor Ekternal

Peluang

NO	LINGKUNGAN	BOBOT	RATING	SCORE (BOBOT X RATING)	PENGARUH
1	Kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	25	4	100	I
2	Penetapan Kepala Daerah kepada Kepala BPKAD sebagai BUD .	20	4	80	II
3	Koordinasi dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya.	15	3	45	III

Ancaman

NO	LINGKUNGAN	BOBOT	RATING	SCORE (BOBOT X RATING)	PENGARUH
1	Perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis.	20	4	80	I
2	Belum optimalnya kemampuan pengelola keuangan dan aset daerah di SKPD.	15	4	60	II
3	Belum optimalnya akses jaringan informasi	15	3	45	III

Dari analisis isu-isu strategis tersebut, dibuat matrik analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) untuk menentukan asumsi strategis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut in:

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN / STRENGTH	KELEMAHAN / WEAKNESSES
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan 2. Adanya Struktur Satuan Kerja serta visi dan misi yang jelas 3. Adanya pegawai guna melaksanakan program dan kegiatan. 4. Adanya komitmen kepala badan dan seluruh staf. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai belum memadai. 2. Kompetensi pegawai belum sesuai. 3. Belum ada gedung kantor yang representatif. 4. Sarana dan prasarana Belum memadai
PELUANG/ OPPORTUNITIES	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 Penetapan Kepala Daerah kepada Kepala BPKAD sebagai BUD . 3 Koordinasi dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melaksanakan pengelolaan kas daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait. 4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pegawai yang ada. 2. Meningkatkan kompetensi pegawai. 3. Tersedianya gedung kantor yang representatif. 4. Menambah sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan.

ANCAMAN/ THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis. 2. Belum optimalnya kemampuan pengelola keuangan dan aset daerah di SKPD. 3. Belum optimalnya akses jaringan informasi	1. Konsisten menerapkan ketentuan yang berlaku. 2. Mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan. 3. meningkatkan akses sistem jaringan.	1. meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa. 2. mempercepat sosialisasi peraturan berkenaan dengan pengelolaan keuangan 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola jaringan internet.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Visi Kabupaten Kubu Raya.

Visi Kabupaten Kubu Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD 2014 – 2019) Yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing”**.

Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. **Harmonis dan Berbudaya**, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

2. Misi Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*).
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dan memiliki integritas.
- c. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.
- d. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kubu Raya

Program-program prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dalam mendukung 8 (delapan) fokus/prioritas pembangunan sebagai berikut:

A. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Program Pendidikan Menengah.
4. Program Pendidikan Non Formal.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
8. Program Penyediaan Operasional Sekolah.
9. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pendidikan.
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RumahSakit.
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
19. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
20. Program Keluarga Berencana.
21. Program Pelayanan Kontrasepsi.
22. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam PelayananKB/KR yang Mandiri.
23. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui KelompokKegiatan di Masyarakat.
24. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB.
25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
26. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

B. Peningkatan Kesejahteraan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

C. Peningkatan Infrastruktur

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya.
7. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
11. Program Pengembangan Perumahan.

12. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
14. Program Perencanaan Tata Ruang.
15. Program Pemanfaatan Ruang.
16. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
18. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
19. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
21. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
22. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
23. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
24. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
27. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
28. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

D. Peningkatan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
9. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah.
12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.
13. Program Penataan Administrasi Kependudukan

E. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual

1. Program Pengembangan Nilai Budaya.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya,
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
6. Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama

F. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Pemanfaatan Ruang.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian.
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
12. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap'
15. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
16. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan'
17. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
19. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
21. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
22. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

G. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
3. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah.
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu

6. Program Pemberdayaan Kecamatan.
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
9. Program Peingkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

H. Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
4. Program Peningkatan Pelayanan Akta Perizinan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perizinan Tertentu.
6. Program Pemberdayaan Kecamatan.
7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
9. Program Peingkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Kedudukan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan daerah, belanja, dan pengelolaan aset daerah untuk mensinergikan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RKPD, Renja dan Renstra Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan peranan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah yaitu sebagai *guiden line* dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD, Rancangan Perubahan

APBD, pelaksanaan penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan Pengelolaan aset daerah, serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sehingga secara ringkas dapat disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan melalui proses baku penyusunan (*due process*).

Berkaitan dengan peraturan tersebut, dalam menjalankan administrasi pengelolaan keuangan daerah, masih ditemukan kendala – kendala antara lain Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini BPKAD mengimplementasikan akuntansi yang berbasis akrual tersebut pada tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan data barang milik daerah yang belum seluruhnya tercatat secara lengkap akan dilakukan penertiban dan diintegrasikan dengan sistem informasi, Hal tersebut dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut :

Matrik Isu-Isu Strategis

No	Isu	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi - Kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan aset 	<ul style="list-style-type: none"> -Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi -Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan aset 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu - Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target - Persentase penerbitan SP2D tepat waktu - Opini BPK terhadap pelaporan keuangan (WTP) - Persentase SKPD yang

				<p>menyampaikan laporan keuangan tepat waktu</p> <p>- Penyampaian rancangan pertanggungja waban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD tepat waktu</p>
2	<p>Penatausah aan Aset yang Tertib dan Terintegrasi sistem informasi</p>	<p>- Menginventarisasi aset milik pemda dengan baik</p> <p>- Penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah</p>	<p>- Terinventarisasinya aset milik pemda dengan baik</p> <p>- Tercapainya penertiban, penataan, pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah</p>	<p>- Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKB</p> <p>- Persentase pencatatan aset tetap</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKAD

1. Tujuan BPKAD Tahun 2015-2019

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka merealisasikan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel “.

Dengan visi tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuan jangka menengah pelayanan BPKAD yang hendak dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan.

2. Sasaran BPKAD Tahun 2015-2019

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:

- 1) Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

- 3) Persentase kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - 4) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - 5) Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan.
- b. Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Standar Laporan Keuangan, dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:
- 1) Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai standar; dan
 - 2) Persentase Pencatatan aset Tetap.
- d. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD, dengan indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP.

Berikut tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPKAD :

TABEL 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD TAHUN 2018 S.D. 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya
				Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

					tahun anggaran berakhir	tahun anggaran berakhir
	Persentase kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				100%	100%
	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
	Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan				100%	100%

		Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)				100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai standar				65%	70%
			Persentase Pencatatan Aset Tetap				60%	65%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP				A	A

TABEL 4.2.**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD TAHUN 2017**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					KE-				
					1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	1. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu			95%		
				Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target			90%		
				Persentase penerbitan SP2D tepat waktu			100%		
				Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)			WTP		

			Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			100%		
			Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu			6 bln setelah th anggaran berakhir		
		Penatausahaan aset yang tertib dan terintegrasi sistem informasi	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU			90%		
			Persentase Pencatatan Aset tetap			75%		

TABEL 4.3.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD TAHUN 2015 S.D. 2016

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					KE-				
					1	2	3	4	5
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku		Terwujudnya penyusunan peencanaan serta penyampaian dokumen APBD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda APBD TA 2016	1 Perda APBD TA 2017	-	-	-
				Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA.2017	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2016	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017	-	-	-
				Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Perda Perubahan APBD TA 2015	1 Perda Perubahan APBD TA 2016	-	-	-
				Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD	1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2016	-	-	-

				TA 2015					
				Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	41 SKPD	38 SKPD	-	-	-
				Penerimaan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	100%	100%	-	-	-
2.	Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan pengeluaran keuangan daerah	Terwujudnya Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	9226 SP2D	9226 SP2D	-	-	-	
			Tersedianya daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya	4264 Daftar Gaji	4264 Daftar Gaji/ Kartu Gaji	-	-	-	
			Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis	20 Juknis	-	-	-	
3.	Meningkatkan pengelolaan pelaporan dan akuntansi	Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-	

4.	keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis SAP	Kubu Raya. Sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	-	-	-
			Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara Tepat Waktu	100%	100%	-	-	-
			Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya	1 Laporan Keuangan KKR	1 Laporan Keuangan KKR	-	-	-
	Meningkatkan pengelolaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dan peratran yang berlaku	Terwujudnya aset daerah yang telah terinventarisir secara baik	Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset daerah	2 Regulasi	2 Regulasi	-	-	-
			Terinventarisirnya Aset Daerah Dalam SIMBADA	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Aset Daerah Yang Dihapus Tiap Tahun	41 SKPD	38 SKPD	-	-	-

5.	Meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan	Terwujudnya birokrasi taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Bertambahnya Aset Daerah Tiap Tahun	2%	2%	-	-	-
			Tersedianya informasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan	100%		-	-	-
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja BPKAD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI BPKAD

Strategi meliputi penetapan kebijakan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Strategi akan memperjelas pemikiran-pemikiran konseptual, analitik, realistis, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

1. Menerapkan Tatakelola Perkantoran Dengan Tertib dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Menerapkan Pengelolaan Pengendalian Anggaran dan Penggunaan Anggaran Daerah dengan Efisien dan Efektif.
3. Menerapkan Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku.
4. Menerapkan Pengelolaan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai SAP pemerintahan Berbasis Akrual.
5. Menerapkan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Pengelolaan Aset SKPD.

5.2 KEBIJAKAN BPKAD

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan/atau petunjuk setiap kegiatan dalam keterpaduan dan kelancaran pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi. Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama. Kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kebijakan merupakan konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Pembinaan Sikap dan Perilaku Pegawai Dalam Bekerja.

2. Meningkatkan Tranparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah.
4. Meningkatkan Pembinaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (SAP AkruaI).
5. Meningkatkan Pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Aset daerah.

Tabel 5.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing

MISI 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)

Sasaran Strategis di RPJMD-P : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD	1. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

		Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web	Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah	Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan
		Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala

		Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai diseluruh Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala
		Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi Perangkat Daerah se Kab.Kubu Raya	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran
		Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perangkat Daerah	Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

			(SAP) yang berbasis akrual
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.	Melakukan Konsolidasi secara berkala dengan Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset.	Melakukan Inventarisasi dan Pemetaan Aset Daerah secara Berkala	Peningkatan validasi pengelolaan data aset
	Meningkatnya	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan	Melakukan Evaluasi

	Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	dan Pelaksanaan Kinerja	Kinerja dalam jangka waktu tertentu
--	--	-------------------------	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya 2014-2019 khususnya menyangkut Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan Kegiatan merupakan pejabaran dari program kerja operasional sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Satuan Kerja.

Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dan lintas SKPD. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kubu Raya.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	T A R G E T										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2015		2016		2017		2018		2019		(5 tahun)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	658.681.042	100	594.368.650	100	645.506.800	100	499.058.000	100	516.325.800	100	2.913.940.292	Sekretariat	BPKAD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman surat	77,78%	1	500.000	1	500.000	1	500.000					3	1.500.000	Sekretariat	Bpkad
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air & Listrik	Tersedianya air dan listrik di ruko penyimpanan dokumen	63,24%	1	132.000.000	1	30.000.000							2	162.000.000	Sekretariat	Bpkad

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik /penerangan bangunan kantor	99,94%	1	4.550.000	1	6.550.000	1	6.550.000	1	5.500.000	1	6.550.000	5	29.700.000	Sekretariat	Bpkad
		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Penyediaan bahan informasi/ koran	71,79%	2850	8.942.500	2880	9.672.500	2890	9.817.200	2720	7.700.000	3189	10.204.800	14529	46.337.000	Sekretariat	Bpkad
		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minum rapat	99,36%	1200	20.000.000	1680	46.200.000	1680	42.000.000	1200	39.000.000	1231	40.000.000	6991	187.200.000	Sekretariat	Bpkad
		Rapat koordinasi & Konsultasi luar Daerah	koordinasi & Konsultasi ke ibu kota negara dan daerah lain	93,39%	15	70.001.042	9	61.934.000	15	136.040.000	17	141.400.000	31	141.400.000	87	550.775.042	Sekretariat	Bpkad
		Rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	koordinasi & Konsultasi dalam kabupaten/ kecamatan	41,97%	10	10.000.000	10	8.933.000	10	17.866.000	10	8.933.000	20	17.866.000	60	63.598.000	Sekretariat	Bpkad
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67,17%	11	15.527.500			11	7.000.000					22	22.527.500	Sekretariat	Bpkad

		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	keamanan sarana dan prasarana kantor	92,13%	1	86.250.000							1	86.250.000	Sekretariat	Bpkad		
		Penataan Arsip/Dokumen Pengelolaan Keuangan	Penataan arsip/ dokumen pengelolaan keuangan SKPD	92,59%	1	10.310.000	1	162.197.000	1	182.284.000	1	173.280.000	1	173.280.000	5	701.351.000	Sekretariat	Bpkad
	II	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	571.822.525	100	584.502.500	100	758.776.000	100	282.094.210	100	373.200.000	57.327	2.520.395.235	Sekretariat	BPKAD
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas/operasional	98,32%	3	40.000.000	2	36.000.000	6	360.375.000					11	436.375.000	Sekretariat	Bpkad
		Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Perlengkapan Gedung kantor	98,54%	6	8.985.600	16	48.790.000	1	9.000.000	1	4.550.000	5	2.000.000	29	73.325.600	Sekretariat	Bpkad
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	peralatan Gedung kantor	82,19%	23	227.222.900	13	249.687.000	18	176.001.000	23	54.338.000	10	56.900.000	87	764.148.900	Sekretariat	Bpkad
		Pengadaan Meubeleur	Tersedianya Meubeleur	98,75%	19	24.495.000	21	34.900.000	17	33.000.000	8	19.755.000			65	112.150.000	Sekretariat	Bpkad
		Penyediaan Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Tersedianya bangunan dan ruangan gedung arsip	98,61%	2	190.000.000	3	110.000.000	1	82.000.000	1	80.000.000	2	160.000.000	9	622.000.000	Sekretariat	Bpkad

	III	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	52.470.000	0	0	100	72.720.000	0	0	69	20.700.000	100	145.890.000	Sekretariat	BPKAD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas		53	41.470.000			78	72.720.000			69	20.700.000	200	134.890.000	Sekretariat	Bpkad
		Pengadaan Pakaian olah raga	pakaian olah raga		53	11.000.000									53	11.000.000	Sekretariat	Bpkad
	IV	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	55.000.000	100	95.947.000	100	119.800.000	100	146.850.000	100	136.300.000	100	553.897.000	Sekretariat	BPKAD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Pengiriman peserta Bimtek	83,24%	5	40.000.000	10	82.500.000	8	75.000.000	7	75.550.000	8	76.000.000	38	349.050.000	Sekretariat	Bpkad
		Penyusunan Evaluasi Jabatan BPKAD	Terlaksananya Evaluasi Jabatan		5	15.000.000	5	13.447.000	5	10.000.000	5	10.000.000		-	20	48.447.000	Sekretariat	Bpkad

		Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun SKPD	99,15%	10	30.000.000	10	13.732.000	10	10.000.000	10	9.500.000	10	10.000.000	50	73.232.000	Sekretariat	Bpkad
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / LPPD	Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ BPKAD		8	9.200.000	8	8.336.500	8	10.000.000	8	10.000.000		-	32	37.536.500	Sekretariat	Bpkad
		Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	Terlaksananya penyusunan Renja, RKA, DPA, dan DPPA						4	9.000.000	4	9.500.000	4	9.500.000	12	28.000.000	Sekretariat	Bpkad
	VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100	100	3.129.867.425	100	3.034.782.815	100	3.598.769.300	100	2.793.444.075	100	3.548.795.030	100	16.105.658.645	Bidang-Bidang	BPKAD
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Perda APBD	96,81%	320	133.664.350	320	290.312.050	360	567.232.000	320	534.236.000	320	589.536.000	1640	2.114.980.400	Bidang Anggaran	Bpkad
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Perbup APBD	99,55%	140	90.877.000	140	163.482.750	190	251.013.000	140	199.525.000	140	241.275.000	750	946.172.750	Bidang Anggaran	Bpkad

	Manajemen Pinjaman Daerah	Pengelolaan Pinjaman Daerah						1	155.400.000	1	71.764.800			2	227.164.800	Bidang Anggaran	Bpkad
	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	Jumlah stiker Barang Milik Daerah BPKAD	32,63%					1500	10.000.000					1500	10.000.000	Bidang Aset	Bpkad
	Penyusunan analisis Standar Belanja (ASB)	Tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai dasar penyusunan APBD										1	294.422.500	1	294.422.500	Bidang Anggaran	Bpkad
	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	Laporan Keuangan Daerah (LRA, LAK, LO, LPE, LP-SAL, Neraca, CaLK)	100%	20	158.079.500	20	190.606.025	22	189.999.800	20	121.076.300	20	170.982.700	102	830.744.325	Bidang Pelaporan dan Akuntansi	Bpkad
VII	Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Interkoneksi Internet dan Jaringan Intranet.				100	51.400.000			100	25.000.000	100	-	100	76.400.000	Sekretariat	Bpkad
	Pembuatan Website	Website BPKAD				1	51.400.000			1	25.000.000			2	76.400.000	Sekretariat	Bpkad

VIII	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah						100	27.000.000	100	51.500.000	100	16.000.000	100	85.000.000	Sekretariat	Bpkad
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik						1	7.000.000	1	9.000.000	1	7.000.000	3	23.000.000	Sekretariat	Bpkad
	Penyusunan Data Base E Formasi	Penyusunan database kebutuhan pegawai, menentukan kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai						6	5.000.000	6	8.000.000	6	-	18	13.000.000	Sekretariat	Bpkad
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan						6	7.000.000	6	7.000.000	6	-	18	14.000.000	Sekretariat	Bpkad
	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat								6	9.000.000	6	9.000.000	12	18.000.000	Sekretariat	Bpkad

		Penyusunan Standar Pelayanan	Terlaksananya standar pelayanan BPKAD					4	8.000.000	4	9.000.000	4	-	12	17.000.000	Sekretariat	Bpkad	
		Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD	Terlaksananya penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)							6	9.500.000			6	9.500.000	Sekretariat	Bpkad	
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100	100	528.316.175	100	542.990.675	100	426.498.400	100	292.530.850	100	363.957.420	100	2.154.293.520	Bidang Aset	Bpkad
		Manajemen Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Persentase peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual		100	232.881.800	100	225.046.000	100	144.179.800	100	102.123.700	100	159.653.900	500	863.885.200	Bidang Pelaporan dan Akuntansi	Bpkad
		Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan Keuangan Semesteran	88,21%	48	85.648.475	48	89.917.475	48	87.485.000	48	147.532.900	48	135.463.550	240	546.047.400	Bidang Pelaporan dan Akuntansi	Bpkad

		Pembinaan Akuntansi SKPD Berbasis Akrual	Peningkatan pemahaman SKPD dalam Akuntansi berbasis akrual (PP.71)	93,85%	41	209.785.900	41	139.126.700	36	92.948.600				118	441.861.200	Bidang Pelaporan dan Akuntansi	Bpkad	
		Pembinaan penyusunan laporan fungsional bendahara SKPD	Terlaksananya Bimtek bagi pengelola keuangan daerah di SKPD, SKPKD dan BLUD				41	88.900.500	36	101.885.000	36	42.874.250	98	68.839.970	211	302.499.720	Bidang Pelaporan dan Akuntansi	Bpkad
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100	100	1.168.653.725	100	1.093.919.900	100	1.084.103.400	100	715.432.900	100	1.720.000.000	100	5.782.109.925	Bidang Aset	Bpkad
		Penyusunan Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang Daerah	Standardisasi biaya pemeliharaan barang daerah	99,32%	70	25.000.000	70	24.173.000	70	26.000.000	70	23.072.000	70	30.000.000	350	128.245.000	Bidang Aset	Bpkad
		Inventarisasi Barang Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah	97,76%	50	284.000.000	50	332.180.000	130	302.667.000	90	181.438.000	90	209.800.000	410	1.310.085.000	Bidang Aset	Bpkad

		Penilaian Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabu. Kubu Raya	Data penilaian barang inventaris milik daerah	80%	30	132.522.000	30	97.619.000	63	99.841.000	30	42.265.000	30	60.000.000	183	432.247.000	Bidang Aset	Bpkad
		Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah		80	38.000.000	80	33.164.500	70	38.000.000	80	34.523.000	80	36.109.000	390	179.796.500	Bidang Aset	Bpkad
		Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kab. Kubu Raya	Tersedianya data nilai aset yang dihapuskan	46,61%	40	99.429.875	40	118.900.700	40	97.600.000	40	60.046.000	40	80.000.000	200	455.976.575	Bidang Aset	Bpkad
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya identitas Aset Milik Pemerintah Daerah	89,19%	50	89.600.600	50	140.536.000	40	134.870.000	30	77.744.900	25	115.000.000	195	557.751.500	Bidang Aset	Bpkad
		Manajemen Aplikasi pemetaan Aset Daerah	Terlaksananya pemetaan aset daerah berbasis geogle map								1	85.944.000	1	91.000.000	2	176.944.000	Bidang Aset	Bpkad

			Penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya Penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Milik Daerah					11	41.000.000	11	41.220.000	11	28.000.000	33	110.220.000	Bidang Aset	Bpkad	
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Standar Satuan Harga Kabupaten Kubu Raya	98,50%	90	59.254.000	90	84.450.000	100	80.000.000	90	45.010.000	100	94.200.000	470	362.914.000	Bidang Aset	Bpkad
			Analisis Standar Belanja	Tersedianya Analisis Standar Belanja dalam kegiatan				1	120.738.300						1	120.738.300	Bidang Aset	Bpkad	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah	I	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100	100	9.857.500	100	9.022.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	48.879.500	Sekretariat	BPKAD
			Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	97,54%	8	9.857.500	8	9.022.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	40	48.879.500	Sekretariat	Bpkad

II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkataualitas Perencanaan Daerah	100	100	20.700.000			100	14.000.000	100	8.500.000	100	18.500.000	400	61.700.000	Sekretariat	BPKAD
	Sistem informasi Perencanaan SKPD	Sistem informasi Perencanaan SKPD	36,38%	1	10.200.000								-	1	10.200.000	Sekretariat	Bpkad
	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	46,41%	1	10.500.000			1	10.000.000			1	10.000.000	3	30.500.000	Sekretariat	Bpkad
	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD	Terlaksanya penyusunan data BPKAD dalam sistem informasi pembangunan monitoring dan evaluasi						5	4.000.000	5	8.500.000	5	8.500.000	15	21.000.000	Sekretariat	Bpkad

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Penyusunan Renstra Perubahan 2015-2019, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari RPJMDP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Untuk mencapai kinerja selama Tahun 2015-2019 sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDP, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMDP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sesuai tabel berikut:

Tabel 7.1

**VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RPJMDPERUBAHAN KABUPATEN KUBU
RAYA TAHUN 2014-2019**

VISI:KABUPATEN KUBU RAYA YANG MAJU,HARMONIS,DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI DAYA SAING

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir		
						2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1.	Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih,baik dan berwibawa(Good Governance)	T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih,efektif,efisien dan berwibawa	S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	Nilai Sakip	Hasil Evaluasi	B	B	BB	A	A	A	A
						3	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan komitmen dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya beserta seluruh staf dan jajaran untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Kubu Raya dengan baik menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Dengan penetapan visi dan misi, serta pemahaman faktor-faktor kunci keberhasilan yang digali dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan arah kebijakan yang hendak dicapai. Perubahan lingkungan memerlukan pengamatan yang cermat, khususnya kemungkinan-kemungkinan perubahan untuk masa yang akan datang. Dengan perumusan Rencana Strategis maka perubahan yang terjadi dapat diprediksi.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya merupakan perwujudan perencanaan secara terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan, berdasarkan akuntabilitas yang memadai. Rencana Strategis ini juga berperan sebagai alat kendali perencanaan, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten Kubu Raya serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan tiga pilar utama yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Rencana Strategis merupakan perencanaan dasar dan membutuhkan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan keadaan, kebutuhan, dan kondisi yang dihadapi. Agar Rencana Strategis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Rencana Strategis Perubahan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dijadikan acuan dalam proses penganggaran tahunan dan penetapan kinerja tahunan.
- ❖ Rencana Strategis memperhatikan kemampuan realistik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian apabila kondisi lingkungan strategis terus berkembang secara signifikan.

- ❖ Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis ini sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.